



**Laporan Kinerja Triwulan 3
BPMP Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Sumatera Utara selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	52.95	%	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	A	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	94.50	Nilai	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress/Kegiatan

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan indikator kinerja [IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Kegiatan yang telah dilakukan dalam priode Juli s.d September 2024 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.1. yaitu :

1. Pemantauan Hasil Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Pendidikan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Objective PDM-04A Jenjang PAUD
2. Penguatan dan Advokasi Tim Helpdesk AN dan Sulinjar Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan pendidikan Oleh UPT jenjang PAUD dan SD
4. Advokasi Peningkatan Capaian Rapor Dapodik
5. Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Juli Tahun 2024
6. Pendampingan Supervisi/Visitasi Gerakan Sekolah Sehat ke Satuan Pendidikan Sekolah Binaan di 33



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kabupaten/Kota

7. Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Penerima BOSP terkait Penggunaan SIPLah Semester II
8. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Program SIAR

Kendala/Permasalahan

1. Partisipan yang kurang banyak mengingat jumlah PAUD yang belum login unduh lebih dari 1000 satuan pendidikan
2. Informasi kegiatan yang tidak sampai ke dinas pendidikan kabupaten/kota sehingga menyebabkan ketidahadiran peserta dari daerah pada kegiatan tersebut sehingga Peserta daerah tidak hadir pada kegiatan
3. Sekolah tidak berkewajiban untuk melakukan PBD berdasarkan Rapor Pendidikan, sekolah yang tidak memiliki jaringan internet, sekolah yang jauh di daerah terpencil
4. Belum semua satuan pendidikan mengisi data dapodik dengan benar
5. Dukungan dan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan dalam mencapai target prioritas
6. Sampai saat ini belum terintegrasinya Halaman Pemetaan Pembelanjaan (HPP) untuk transaksi SIPLah pada Arkas 4.2.4 .

Strategi/Tindak Lanjut

1. Dilakukan zoom kembali untuk partisipan pengawas dan dinas kab/ kota
2. Menkomunikasikan kembali ke daerah tentang kegiatan ini
3. Diadakan advokasi PBD dan Rapor Pendidikan secara daring dan berkala
4. Melakukan advokasi peningkatan capaian rapor dapodik terhadap Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan
5. Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan September Tahun 2024 dan Mereviu capaian RTL Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Juli Tahun 2024
6. Dalam waktu satu bulan direncanakan sudah terintegrasi HPP pada Arkas 4.2.4. Dengan memberikan masukan saat kegiatan ini berlangsung memberikan masukan yang nyata dan berarti kepada tim pengembang pusat.
7. Adanya BIMTEK ARKAS yang terkait ini dan Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Program SIAR

BPMP Provinsi Sumatera Utara telah mencapai beberapa hal pada kegiatan triwulan ini yaitu diantaranya kegiatan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Pendidikan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Objective PDM-04A Jenjang PAUD Terlaksana dengan baik diikuti oleh lebih 100 orang partisipan, Peningkatan kompetensi tugas, fungsi dan wewenang Satgas TPPKS, Pemahaman Pembentukan Satgas dan TPPK, Peningkatan kompetensi Satgas untuk menyusun program pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan Satuan Pendidikan, Kegiatan PMO Bulan Juli terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan, Capaian dalam Gerakan Sekolah Sehat dari 138 satuan pendidikan sasaran, rata-rata memiliki predikat sbb :(a) Sehat Gizi satuan pendidikan memiliki predikat Cukup memadai atau sebesar 66,11% (b) Sehat Fisik satuan pendidikan memiliki predikat Sangat Baik atau sebesar 88,99% (c) Sehat Imunisasi satuan pendidikan memiliki predikat Baik sebesar 76,7% (d)Sehat Lingkungan satuan pendidikan memiliki predikat Sangat Baik sebesar 88,74% (e) Sehat Jiwa satuan pendidikan memiliki predikat Cukup Memadai sebesar 70,16%

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Capaian kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan indikator kinerja [IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Kegiatan yang telah dilakukan dalam periode Juli s.d September 2024 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.2. yaitu:

1. Workshop Kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar
2. Penguatan dan Advokasi Tim Helpdesk AN dan SULingjar Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan pendidikan Oleh UPT jenjang PAUD dan SD
4. Bimtek PPKSP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan)
5. Monitoring persiapan dan Advokasi Pelaksanaan AN tahun 2024
6. Pemantauan Pelaksanaan AN Tahun 2024 (Jenjang SMA)
7. Advokasi Peningkatan Capaian Rapor Dapodik
8. Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Juli Tahun 2024
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perencanaan Berbasis Data oleh UPT Jenjang SMP dan SMA
10. Pendampingan Supervisi/Visitasi Gerakan Sekolah Sehat ke Satuan Pendidikan Sekolah Binaan di 33 Kabupaten/Kota
11. Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Penerima BOSP terkait Penggunaan SIPLah Semester II
12. Pemantauan Pelaksanaan AN Tahun 2024 Jenjang SMP
13. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Program SIAR

Kendala/Permasalahan

1. Tidak tersampainya kebijakan Asesmen Nasional dan sulingjar tahun 2024 karena banyak Peserta tidak hadir karena undangan tidak sampai.
2. Informasi kegiatan Penguatan dan Advokasi Tim Helpdesk AN dan SULingjar Daerah yang tidak sampai ke dinas pendidikan kabupaten/kota sehingga menyebabkan ketidahadiran peserta dari daerah pada kegiatan tersebut.
3. Sekolah tidak berkewajiban untuk melakukan PBD berdasarkan Rapor Pendidikan, sekolah yang tidak memiliki jaringan internet, sekolah yang jauh di daerah terpencil
4. Kendala dalam Bimtek PPKSP yaitu: (a) Anggota Satgas berasal dari Dinas / OPD yang berbeda dan memiliki dasar hukum yang berbeda dalam mengeksekusi sebuah permasalahan.(b) Anggota Satgas berasal dari Dinas / OPD yang berbeda sehingga butuh waktu dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan. (c) 3 Satgas PPKSP (Provinsi/Kab/kota) tidak mengirimkan anggotanya, 3 Satgas PPKSP (Kab/kota) masing-masing hanya mengirimkan 1 anggotanya (9 orang tidak ditugasi)
5. Kendala dalam kegiatan Monitoring persiapan dan Advokasi Pelaksanaan AN tahun 2024 yang ditemui yaitu Sekolah sasaran yang jauh atau sudah tutup sehingga Sekolah tidak dapat dikunjungi
6. Kendala dalam Pemantauan Pelaksanaan AN Tahun 2024 (Jenjang SMA) yaitu Lokasi sekolah sasaran yang jauh dan jadwal AN sekolah sasaran yang tidak tepat dengan tanggal pelaksanaan tugas.
7. Belum semua satuan pendidikan mengisi data dapodik dengan benar
8. Kendala dalam Rapat Rutin PMO bulan Juli yaitu Dukungan dan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan dalam mencapai target prioritas
9. Kendala dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perencanaan Berbasis Data oleh UPT Jenjang SMP dan SMA yang ditemui yaitu Sebagian besar satuan pendidikan belum tersosialisasi dengan baik tentang SYKCC oleh Dinas Pendidikan Kab/ Kota, sehingga SYKCC tidak maksimal terjadi di satuan pendidikan
10. Kendala dalam kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Penerima BOSP terkait Penggunaan SIPLah Semester II, yang ditemui yaitu :Sampai saat ini belum terintegrasinya Halaman Pemetaan Pembelanjaan (HPP) untuk transaksi SIPLah pada Arkas 4.2.4 .
11. Kendala dalam kegiatan Pemantauan Pelaksanaan AN Tahun 2024 Jenjang SMP yaitu Sekolah yang berjauhan, Kemampuan Petugas belum begitu ahli dalam wawancara



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Strategi/Tindak Lanjut

1. Solusi dari kendala Tidak tersampainya kebijakan Asesmen Nasional dan sulingjar tahun 2024 karena banyak Peserta tidak hadir karena undangan tidak sampai Menginformasikan kembali kepada daerah sebelum jadwal kegiatan dimulai
2. Mengkomunikasikan kembali ke daerah tentang kegiatan Penguatan dan Advokasi Tim Helpdesk AN dan Sulingjar Daerah
3. Berkoordinasi dengan disdik kab/kota dan cabdis wilayah memilih sekolah yang dapat dikunjungi dalam kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan pendidikan Oleh UPT jenjang PAUD dan SD
4. Solusi dari Kendala dalam Bimtek PPKSP yaitu:
 - BPMP melakukan penekanan ulang ke semua Satgas PPKSP Provinsi/Kabupaten / kota di Sumatera Utara bahwa dasar hukum penganan tetap mengacu kepada Permendikbudristek No 46 Tahun 2023.
 - BPMP telah menyampaikan dan mensosialisasikan:
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,
 - Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan,
 - Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
 - Mengimbuu semua Satgas PPKSP Provinsi/Kabupaten / kota di Sumatera Utara agar masing-masing anggotanya berkoordinasi dan bersinergi sehingga memiliki kesamaan gerak dan langkah.
 - Mengimbuu semua Satgas PPKSP Provinsi / Kabupaten / kota di Sumatera Utara agar melakukan Bimtek PPKSP di daerah masing-masing
5. Solusi dari kendala Sekolah sasaran yang jauh atau sudah tutup dalam kegiatan Monitoring persiapan dan Advokasi Pelaksanaan AN tahun 2024 yaitu Berkoordinasi dengan disdik kab/kota dan cabdis wilayah memilih sekolah yang dapat dikunjungi
6. Solusi dari kendala dalam Pemantauan Pelaksanaan AN Tahun 2024 (Jenjang SMA) yaitu Lokasi sekolah sasaran yang jauh dan jadwal AN sekolah sasaran yang tidak tepat dengan tanggal pelaksanaan tugas adalah Berkoordinasi dengan cabdis wilayah setempat untuk lokasi sekolah dan memantau melalui webANBK untuk jadwal sekolah yang tepat.
7. Melakukan advokasi peningkatan capaian rapor dapodik terhadap Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan
8. Solusi dari kendala kegiatan PMO rutin
 - Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah yang dilakukan secara rutin
 - Menjalin komunikasi personal/ intensif antara BPMP Provinsi Sumatera Utara (Wali Wilayah) dengan pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi
9. Solusi kendala dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perencanaan Berbasis Data oleh UPT Jenjang SMP dan SMA yaitu Melakukan sosialisasi pada saat monev dan akan melaksanakan sosialisasi secara daring
10. Solusi dari kendala kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Penerima BOSP terkait Penggunaan SIPLah Semester II yaitu Dalam waktu satu bulan direncanakan sudah terintegrasi HPP pada Arkas 4.2.4. Dengan memberikan masukan saat kegiatan ini berlangsung memberikan masukan yang nyata dan berarti kepada tim pengembang pusat.
11. Solusi dari kendala kegiatan Pemantauan Pelaksanaan AN Tahun 2024 Jenjang SMP yaitu berkoordinasi dengan Disdik setempat, untuk daerah jauh disiasati dengan keberangkatan lebih awal

Pada triwulan ke 3 ditahun 2024 beberapa hal yang telah dicapai dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung penacapaian indikator kinerja IKK. 1.2 yaitu Tersosialisasinya kebijakan Asesmen Nasional dan sulingjar kepada daerah, dalm hal kegiatan Bimtek PPKSP hal yang telah dicapai yaitu (a) Peningkatan kompetensi tugas, fungsi dan wewenang Satgas, (b) Pemahaman Pembentukan Satgas dan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

TPPK. (c) Peningkatan kompetensi Satgas untuk menyusun program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, Semua daerah sasaran (100%) telah melaksanakan Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Juli Tahun 2024 sesuai rencana yang telah ditetapkan, Dari 138 satuan pendidikan sasaran Gerakan Sekolah Sehat (GSS), rata-rata memiliki predikat sbb: (a) Sehat Gizi satuan pendidikan memiliki predikat Cukup memadai atau sebesar 66,11% (b) Sehat Fisik satuan pendidikan memiliki predikat Sangat Baik atau sebesar 88,99% (c) Sehat Imunisasi satuan pendidikan memiliki predikat Baik sebesar 76,7% (d) Sehat Lingkungan satuan pendidikan memiliki predikat Sangat Baik sebesar 88,74% (e) Sehat Jiwa satuan pendidikan memiliki predikat Cukup Memadai sebesar 70,16%, Kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Program SIAR telah telaksana 100% yaitu ke 34 Kab/Kota di Sumatera Utara.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

Progress/Kegiatan

Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 yaitu 84,05 dan mendapatkan predikat A atau memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja. Untuk meningkatkan capaian kinerja [SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dengan indikator [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara, Pada triwulan III Tahun 2024 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan program kerja Per PIC di BPMP setiap minggunya pada hari senin
2. Pelaksanaan Kegiatan Komunitas Belajar Internal BPMP Provinsi Sumatera Utara telah terselenggara dengan baik setiap bulan
3. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi SAKIP Triwulan 3
4. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III
5. Telah dilaksanakan kegiatan Forum Komunitas belajar UPT yang mengundang seluruh kepala BPMP
6. Telah dilaksanakan Evaluasi Mandiri AKIP Tahun 2024, menurut hasil LKE mandiri BPMP Provinsi Sumatera Utara memperoleh predikat AA

Kendala/Permasalahan

Dinamika kebijakan pusat yang berdampak pada perubahan strategi dan waktu pelaksanaan kegiatan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaporan kegiatan untuk menemukan solusi bersama.
2. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progress kinerja
3. Melakukan sinkronisasi program kegiatan dan anggaran

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

Progress/Kegiatan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Provinsi Sumatera Utara Triwulan 3 Tahun 2024 yaitu 95,93 Dari 7 indikator penilaian IKPA, BPMP Provinsi Sumatera Utara ada 4 indikator IKPA yang nilainya



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

dibawah 100 dan masih perlu ditingkatkan pencapaiannya yaitu:

1. Indikator Deviasi Hal DIPA 3 yang nilainya hanya mencapai 83,22
2. Indikator Penyerapan Anggaran yang nilainya hanya mencapai 93,75
3. Indikator Belanja Kontraktual yang nilainya hanya mencapai 98,86
4. Indikator pengelolaan UP dan TUP yang nilainya hanya mencapai 98,13

Dari empat indikator diatas, indikator penyerapan anggaran dan indikator pengelolaan UP dan TUP mengalami peningkatan dibanding nilai pada Triwulan 2, nilai indikator penyerapan anggaran meningkat dari 92,05 menjadi 93,75 pada triwulan 3, hasil ini merupakan upaya maksimal dari pengelolaan anggaran dengan menyelaraskan Rencana Penarikan Anggaran (RPD) dengan realisasi anggaran sesuai jadwal kegiatan dari tim kerja PDM. Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP juga meningkat dari 96,76 menjadi 98,13 pada triwulan ini, hasil ini merupakan upaya dari meningkatkan belanja melalui penggunaan kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Kendala/Permasalahan

1. Penurunan nilai indikator belanja kontraktual dari segi penurunan nilai kontrak dini karena banyak kontrak yang dilaporkan pada triwulan 3.
2. Terdapat 4 indikator pada IKPA yang mendapatkan nilai dibawah 100 yaitu deviasi halaman III DIPA dengan nilai 83,22 Penyerapan Anggaran dengan nilai 93,75 Belanja Kontraktual dengan nilai 98,86 dan pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 98,13.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Tim kerja PDM terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Mengupayakan agar penyerapan anggaran sesuai dengan Proyeksi Halaman DIPA
3. Meningkatkan pemakaian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk meningkatkan nilai dari indikator pengelolaan UP dan TUP
4. Dalam hal meningkatkan nilai indikator penyerapan anggaran dapat dilakukan dengan cara mempercepat pertanggungjawaban agar SP2D terbit sebelum akhir bulan berjalan.
5. Dalam hal penurunan nilai kontrak dini dapat diminimalisir dengan mebatasi pelaporan kontrak pada triwulan 2, 3 dan 4, sehingga nilai indikator belanja kontraktual tidak semakin menurun

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	13702	12203	1499	Rp24.860.413.000	Rp18.510.506.707	Rp6.349.906.293
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	9064	8334	730	Rp553.552.000	Rp553.552.000	Rp0
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp465.000.000	Rp447.012.000	Rp17.988.000
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp27.238.938.000	Rp22.551.195.061	Rp4.687.742.939
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	Rp2.211.623.000	Rp706.648.976	Rp1.504.974.024
[WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp224.527.000	Rp223.525.876	Rp1.001.124
Total Anggaran					Rp55.564.053.000	Rp42.992.440.620	Rp12.571.612.380

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Mengoptimalkan peran wali wilayah dalam advokasi kepada pemerintah daerah/satuan pendidikan terkait program prioritas nasional
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan selama triwulan 3 dan memilih solusi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melakukan perencanaan anggaran pada Triwulan ke-4 sesuai dengan jadwal kegiatan, terutama program prioritas nasional yang belum dilaksanakan pada Triwulan ke-3

Medan, 1 November 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara Tajuddin Idris, S.Si., M.T
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**